

Airlangga: Sambungan hal 1

“Karena itu, G20 harus mendorong upaya peningkatan di sektor industri, perdagangan dan untuk lebih menarik investasi. Ini merupakan seruan bagi negara-negara G20 untuk bekerja sama lebih baik lagi dalam memberikan dukungan yang diperlukan guna mendorong aspek-aspek industri dan perdagangan yang mengadopsi teknologi, khususnya di negara-negara berkembang,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan, Pemerintah terus mengembangkan sistem teknologi dan informasi untuk mendukung proses supply chain. Dengan cara tersebut, Pemerintah dapat memantau pembaruan data dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya Pemerintah yang tengah memperkuat UMKM untuk menjadi nilai tambah bagi supply chain. Pemerintah terus

berkomitmen menguatkan dan mendorong UMKM karena UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen dari PDB nasional dengan penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi.

“Indonesia sangat menghargai kontribusi dari UMKM. Karena itu, Pemerintah terus meningkatkan ketahanan UMKM agar dapat terus beradaptasi menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Saya percaya bahwa di banyak negara, UMKM menjadi salah satu sektor paling rentan yang membutuhkan perhatian ekstra. Karena itu, saya mendorong G20 untuk menemukan rekomendasi guna meningkatkan ketahanan sektor ini, dan mendorong UMKM untuk menjadi bagian penting dari rantai nilai,” tegas Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga kembali menekankan bahwa dalam Presidensi G20 tahun ini, Indonesia terus men-

dorong penguatan kerja sama antarnegara-negara G20 dalam menetapkan arah strategis untuk memulihkan kepercayaan terhadap institusi global. Platform multilateral menjadi penting, sehingga pertemuan-pertemuan G20 didorong untuk dapat memberikan banyak pengayaan bagi anggota G20.

“Kita membutuhkan solusi global untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Saya yakin bahwa mekanisme multilateral akan menjadi platform terbaik, di mana kita dapat menemukan solusi dan jawaban, yang mewakili kesatuan tujuan negara-negara di seluruh Kawasan dunia,” pungkas Menko Airlangga.

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi/Kapala BKPM, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan para Menteri beserta Delegasi negara-negara G20. (Fie)-f

KPK Sambungan hal 1

namun kembali kambuh setelah agak lama,” tambah Ghufroan.

Sejumlah pihak yang terjaring OTT saat ini sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Barang bukti sejumlah

uang dalam pecahan mata uang asing dari OTT tersebut juga masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (Full)-f

Pengusaha Sambungan hal 1

“Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum tersebut didukung dengan penerapan forensik digital dalam pengumpulan data,” kata Pit Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY Slamet Sutanto dalam jumpa pers di Gedung Kanwil DJP DIY, Depok, Sleman, Kamis (22/9). Dalam jumpa pers tersebut juga ditunjukkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Hadir pula Tim Kejaksaa Tinggi DIY dan Polda DIY.

Kedua tersangka, yaitu HP dan PT PJM disangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pengenaan tersangka pada PT PJM ini merupakan hasil penyidikan pidana pajak dengan tersangka korporasi yang pertama kali dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP di luar Kanwil DJP yang ada di Jakarta.

Dalam rangka mengamankan aset kedua tersangka yang nantinya akan digunakan untuk pemulihan Kerugian Pendapatan Negara, PPNS Kanwil DJP DIY telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam bentuk penyitaan dan pemblokiran aset wajib pajak. Sejumlah aset kedua tersangka telah disita dan diblokir dalam rangka untuk pemulihan Kerugian Pendapatan Negara.

“Upaya hukum ini sebagai upaya terakhir dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pembinaan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh DJP yang

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dilaksanakan mulai dari tingkat Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Pajak (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pusat,” jelasnya.

Kajati DIY Katharina Endang Sarwestri SH MH didampingi Wakajati DIY Witono SH MH menambahkan, perkara ini merupakan perkara pajak terbesar yang dilimpahkan ke Kejati DIY, dimana perkara dengan tersangka HP dan korporasi PT PJM ini jumlah kerugiannya mencapai Rp 97.309.185.494.

“Ini juga pertama kali yang melibatkan korporasi. Dan perkara ini sudah memasuki tahap dua yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik PPNS Kanwil DJP DIY ke Kejati DIY,” jelasnya.

Menurutnya, tersangka saat ini hanya dilakukan tahanan kota karena cukup kooperatif dan mempunyai itikad baik ingin melunasi denda. “Diduga tersangka melanggar Pasal 39 (1) UU No 28 Tahun 2007. Untuk ancaman hukumannya minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun penjara. Kemudian denda 2-4 kali dari pajak yang digelapkan,” terangnya. (Awh/Sni)-f

Aset yang Disita

Dari tersangka HP:

- Uang tunai Rp 13.089.000
- Perhiasan
- Tanah dan bangunan senilai Rp 45.016.302.000
- Jam tangan mewah 9 buah
- Tas mewah 32 buah
- Sepeda motor senilai Rp 40.018.000

Dari tersangka PT PJM:

- Uang tunai Rp 12.006.183.846
- Perhiasan
- Tanah dan bangunan senilai Rp 30 772.304.000
- Kendaraan roda empat senilai Rp 358 203.000

Keterangan: Selain uang tunai telah dilakukan penilaian oleh Appraisal.

(KR-Awh/Grafis: Arko)

'Jobseeker' Sambungan hal 1

adalah penetapan di KPU Pusat. Logikanya, jika sejak awal sudah ada pengawasan di tingkat bawah terhadap jalannya dua tahapan tersebut, maka problem di atas (saat penetapan oleh KPU) akan dapat dicegah, atau paling tidak diminimalisir. Di sinilah peran pengawas ad-hoc menemukan urgensinya.

Istilah panitia *ad-hoc* memang tidak ada di UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut penyelenggara pemilu tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara, juga penyelenggara pemilu yang dibentuk di luar negeri. Karena pembentukannya hanya saat ada tahapan pemilu, maka disebut *ad-hoc* (tidak tetap).

Meski hanya bersifat *ad-hoc*, tapi eksistensinya tidak kalah penting dengan penyelenggara pemilu yang berifat tetap (KPU-Bawaslu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Justru, integritas pemilu berawal dari kinerja panitia *ad-hoc*. Contoh, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten tidak hanya ditentukan oleh hasil rekapitulasi KPU Kabupaten, tapi berawal sejak penghitungan suara

oleh KPPS dan rekapitulasi perolehan suara di kecamatan oleh PPK. Demikian juga perolehan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi, DPR RI, DPD bahkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Jika panitia *ad-hoc* bekerja dengan cermat, teliti, dan tidak memihak, maka dijamin perolehan suara peserta pemilu akan mumi, tidak bias, dan saat direkap di tingkat atas akan mencerminkan perolehan suara yang sesungguhnya. Dari sinilah, panitia *ad-hoc* menjadi awal untuk terselenggaranya pemilu yang luber-jurdil. Panitia *ad-hoc* ibarat garda depan agar tercipta pemilu berintegritas. Sehingga, rekrutmen panitia *ad-hoc* (termasuk panwascam) juga akan menjadi awal agar Pemilu 2024 berlangsung luber jurdil dan demokratis.

Selama ini, posisi sebagai panitia *ad-hoc* kerap dipandang sebelah mata. Malah ada anggapan pendaftaran panitia *ad-hoc* sebagai lowongan kerja lama tahunan. Sehingga tidak sedikit mereka yang berpartisipasi mendaftar adalah para *jobseeker* (pencari kerja). Memang tidak sepenuhnya salah, sebab

ada honor bagi panitia *ad-hoc*. Tapi kalau hanya semata-mata mengharapkan honor (upah), para *jobseeker* akan kecewa. Beban kerja panitia *ad-hoc* tidak sebanding dengan honor yang diterima. Banyaknya kasus panitia *ad-hoc* yang sakit dan meninggal dunia saat menjalankan tugas menandakan kerja mereka sangat berat, terlebih sejak pemilu dilangsungkan serentak.

Mereka yang akan mendaftar parwascam jangan hanya berorientasi pada honor (upah) semata sebagaimana layaknya seorang pekerja. Harus dilandasi jiwa pengabdian dan idealisme untuk menegakkan demokrasi, terutama mengawal suara rakyat, agar pemilu berlangsung luber-jurdil. Akhirnya, rekrutmen terhadap panitia *ad-hoc* tidak sekadar berpatokan kapabilitas, tapi juga memerhatikan independensi. Diharapkan, gabungan keduanya akan menjadikan seorang penyelenggara pemilu *ad-hoc* punya integritas dan jiwa pengabdian.

(Penulis adalah peneliti di Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY, Anggota KPU Kulonprogo 2 periode)-d

Sampaikan Sambungan hal 1

dikemas menyesuaikan tuntutan zaman. Pentas wayang kulit dalam rangkaian 77 Tahun KR ini didukung karawitan dan *waranggana* yang selama ini mampu bekerja sama secara harmonis. “Saya tidak akan berhasil tanpa dukungan para *pengrawit* dan . Saya berterima kasih dipercaya tampil mendalang lagi untuk menyemarakkan Peringatan 77 Tahun KR. Agar bisa tampil maksimal membawakan lakon ‘Pandhawa Bangkit’, kami telah berlatih bersama tim karawitan dan *waranggana*,” ujar Ki Anom Sucondro.

Lakon ‘Pandhawa Bangkit’, papar Ki Anom Sucondro, intinya mengisahkan keluarga Pandhawa Prabu Puntadewa bersama adik-adiknya, tokoh satria yang jujur, selalu berbuat kebajikan dan berbakti kepada kedua orang tua. “Meski selalu dimusuhi dan difitnah oleh keluarga Hastina Prabu Duryudana, namun keluarga Pandhawa bisa selamat. Bahkan keluarga Pandhawa justru mempunyai semangat bangkit untuk menyelesaikan semua persoalan dengan baik,” katanya.

Ki Anom Sucondro mengungkapkan, cerita ini menggambarkan Prabu Duryudana sedang *semedi* didatangi oleh Bethari Durga. Bahwa Bethari Durga sanggup memusu-

nahkan keluarga Pandhawa Prabu Puntadewa, Werkudara, Harjuna, Nakula dan Sadewa. Asalkan, Prabu Duryudana harus mengikuti semua perintah Bethari Durga. Keluarga Pandhawa, juga melakukan *semedi* karena bersyukur atas kebangkitan mulai dari masa anak-anak hingga mendapat Bumi Mertani. Keluarga Pandhawa mendapat *wangsit* harus meluhurkan orang tuanya. Keluarga Pandhawa oleh Bethara dibawa ke Khayangan atas perintah Bethara Guru. Namun setelah sampai Khayangan, atas hasutan Bethari Durga, keluarga Pandhawa dimasukkan ke kawah. Kecuali Werkudara *semedi* di Sumur Jalatundha menjadi begawan bernama Bima Paksa. Bethari Durga bersama anaknya Kala Gumarang, ingin memangsa Bima Paksa dan Pandhawa selaku *sukerta*. Hanya saja Semar mohon izin dari Padawenang segera meruwat Durga dan Kala. Prabu Puntadewa murka berubah menjadi raksasa, dan Semar segera bertindak untuk menyelamatkan keluarga Pandhawa. “Namun apa keluarga Pandhawa bisa lolos dari kawah? Cerita selengkapnya, bisa dilihat dalam gelaran wayang kulit di halaman Percetakan PT BP KR,” kata Ki Anom Sucondro. (Cil)-f

Tingkatkan Sambungan hal 1

Kemenkeu, Jakarta, Kamis (22/9), dalam Rakemas bertema ‘Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat’.

Baskara Aji mengatakan, penghargaan ini dapat dijadikan motivasi bagi ASN di lingkungan Pemda DIY untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penghargaan ini juga bisa menjadi gambaran kondisi pengelolaan APBD DIY.

“Penghargaan ini bisa menjadi gambaran administrasi dan transparansi keuangan kita telah mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Karena itu perlu dipertahankan. Saya mewakili Pemda DIY juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh OPD maupun unit kerja di lingkungan Pemda DIY yang telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Baskara Aji.

Baskara Aji menuturkan, ada beberapa pesan dari Menkeu agar semua kementerian, lembaga maupun Pemerintah Daerah mampu menata prioritas keuangan. Karena dengan predikat WTP ditambah penataan prioritas anggaran, maka peruntukan anggaran bisa

lebih tepat manfaat.

“Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah penataan prioritas anggaran. Prioritas anggaran dinilai mampu memelihara kondisi APBN dan APBD, sehingga peruntukan anggaran bisa betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pencapaian prestasi kali ini merupakan hal yang luar biasa karena diraih di saat kondisi yang tidak biasa. Mengingat dalam dua tahun terakhir ada program khusus menghadapi penanganan covid dan pemulihan ekonomi.

“Harus kita akui, saat itu tantangan yang harus dihadapi sangat tidak biasa. Namun tetap bisa akuntabel itu tidaklah mudah. Jadi prestasi ini tergolong luar biasa,” ujamnya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, tujuan Rakemas untuk memberikan apresiasi atas raihnan opini WTP kementerian, lembaga maupun Pemda. Rakemas juga untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. (Ria)-f

Ibu Sambungan hal 1

dirinya akan mantu (lagi).

“Terus tadi Ibu (Iriana) juga bilang, ‘Ibu Bupati, aku mau mantu lho, nanti hadir ya’, terus saya jawab, ‘Iya Bu, saya diberi tugas apa ibu? Oh ndak, datang aja’. Gitu kata beliau. Pokoknya tadi beliau gembira menyampaikan itu,” lanjutnya.

Meskipun telah diundang, Yuni mengaku belum diberikan bocoran tanggal pernikahan Coesang Pangarep dan Erina Gudono. Selama melihat dan membeli batik, Iriana lebih mencari kain batik yang cocok untuk Presiden Jokowi. “Tadi melihat batik-batik, bagus untuk Bapak (Presiden Jokowi). Membelikan batik untuk Bapak. Ibu Wakil Presiden juga tadi belanja lumayan banyak, juga untuk Bapak (Wakil Presiden Ma’ruf Amin),” tambah Yuni.

Sementara, pemilik Batik Windasari, Wwlin Muji Lestari, mengatakan ada sebagian anggota rombongan Iriana Jokowi yang menawarkan batik tulisnya. “Kasihan kalau batik tulis ditawarkan. Batik tulis itu bikinnya rumit, sulit, butuh waktu lama, butuh keahlian, jadi jangan ditawarkan,” kata Wwlin.

Wwlin mengatakan, rombongan istri penjabat itu

menawar batiknya secara sembunyi-sembunyi saat Iriana Widodo tak ada. “Kalau ada Ibu (Iriana Widodo) nggak berani nawar,” ujamnya.

Iriana dan rombongan membeli sejumlah batik saat datang ke Desa Kliwonan. Namun, Wiwin enggan membeberkan berapa batik yang terjual.

Adapun batik paling mahal yang terjual harganya Rp 6,5

juta. “Yang jelas, Ibu Iriana tadi membeli banyak, tidak hanya untuk keluarga, tapi paspampres dan semua ajudannya juga dibelikan,” tambah Wwlin.

Selain ke gerai batik, pagi sebelumnya rombongan juga melakukan kegiatan pembagian sembako di kantor Kecamatan Masaran. Selain itu, juga mendatangi TK Pertiwi 1 Desa Kliwonan, Masaran. (Sam)-f

Prakiraan Cuaca					Jumat, 23 September 2022	
Lokasi	Pagl	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-31	70-95
Sleman					23-30	75-95
Wates					23-31	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-31	70-95
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir	Grafis : Arko	

Rizqi Sukma Kharisma, M.Kom

Dosen Prodi S1 Informatika

Universitas Amikom Yogyakarta

Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi TPA Piyungan

(Kartamantul) sangat merasakan dampak dari penutupan TPA Piyungan ini. TPA Piyungan merupakan pintu terakhir sampah dari ketiga wilayah ini. Data dari UPT Pengelola TPST Piyungan, TPA Piyungan mendapatkan kiriman sampah total 630-650 ton per hari. Dampak yang terjadi akibat penutupan TPA Piyungan adalah tumpukan sampah menggunung di rumah-rumah, TPS dan bahkan di pinggir-pinggir jalan. Selain mengganggu pemandangan, sampah yang tidak terangkut ke TPA Piyungan menimbulkan bau menyengat dan beresiko menyebabkan penyakit. Bahkan sempat muncul topik yang sempat trending yaitu “Jogja Danurat Sampah”.

Pemasalahan TPA Piyungan ini tidak hanya membutuhkan solusi kebijakan dari pemerintah, namun juga peran aktif masyarakat. Tidak hanya hilir saja (TPA Piyungan) yang dibenahi namun juga butuh peran serta masyarakat mulai dari setiap rumah sebagai hulu dari permasalahan sampah ini. Kelurahan Bener, Kota Yogyakarta mulai bergerak

dengan pemberdayaan masyarakat membentuk Bank Sampah. Kerja sama antara pengurus RT, RW, DLH, organisasi Bener Ramah Lingkungan (BERAMAL) dan pemerintah Kelurahan Bener menginisiasi terbentuknya Bank Sampah pada masing-masing RW. Wujud satu RW harus memiliki satu bank sampah direalisasikan oleh Kelurahan Bener, meskipun beberapa RW sempat vakum dan tidak beroperasi secara aktif akibat dampak pandemi covid 19 yang lalu.

Bank Sampah merupakan salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang terbuang di TPA Piyungan. Para pengurus mengedukasi warga agar dapat memilih jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi dan dapat ditabung ke Bank Sampah, juga memilih jenis sampah yang dapat diproses menjadi kompos agar lebih bermanfaat bagi tanaman dan kesuburan tanah. Sehingga diharapkan dari proses pemilihan jenis sampah sebelumnya hanya menyisakan sedikit jenis sampah kategori residu yang kemudian sampah jenis ini akan dikirimkan ke TPA Piyungan untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Selain mengurangi sampah yang terbuang ke TPA Piyungan, edukasi Bank Sampah agar warga dapat menerapkan 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, harapannya agar volume sampah tidak bertambah banyak dan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sampah tersebut sehingga mewujudkan sampah membawa berkah bagi rumah tangga. Hal ini juga selaras dengan peraturan Menti Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Dari Latar belakang tersebut maka hal ini menggerakkan pengait lingkungan warga masyarakat Kelurahan Bener, organisasi Bener Ramah Lingkungan (BERAMAL) bekerja sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta dalam program Program Kemitraan Masyarakat mendukung dalam program Bank Sampah ini. Dalam program ini Universitas Amikom Yogyakarta melalui dua orang dosen Rizqi

Sukma Kharisma, M.Kom dan Vidyana Arsanti, S.Si., M.Sc. dan beberapa mahasiswa membantu proses dalam kegiatan Bank Sampah yang di antaranya adalah : penyediaan perangkat timbangan digital untuk mempercepat proses penimbangan di bank sampah, penyediaan alat perlindungan diri (APD) berupa sepatu boot dan kaus tangan untuk pengelola bank sampah. Selain itu penyediaan sistem informasi manajemen bank sampah untuk mendukung proses transaksi Bank Sampah. Tidak hanya fasilitas pendukung bank sampah, namun dalam program ini dibuat instrumen untuk edukasi dan ajakan kepada masyarakat melalui poster yang didistribusikan ke warga. Dengan ini diharapkan semakin banyak warga masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilihan sampah dan benefit yang didapatkan melalui Bank Sampah.

Salah satu pengurus Bank Sampah menyampaikan bahwa alat-alat yang diberikan ini akan dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Creative Economy Park